

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DISPENDA SULAWESI UTARA

Oleh:
Fina Ekawati

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Samratulangi Manado
email: finaekawati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam menjalankan suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu hal yang berperan. Dalam organisasi pemerintahan terbagi dalam unit-unit organisasi yang merupakan pusat pertanggungjawaban. Sebagai suatu pusat pertanggungjawaban sangat diperlukan pengendalian dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sulut yang merupakan salah satu unit organisasi pemerintahan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut menerapkan sistem pengendalian manajemen secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen pada Dinas telah efektif dan efisien, dimulai dengan penentuan visi dan misi serta tujuan, sasaran, membuat struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta pemungutan pajak kendaraan bermotor yang melebihi target yang yang diharapkan.

Kata kunci: sistem pengendalian manajemen, pusat pertanggungjawaban

ABSTRACT

Management control systems play important role in running both private and government organizations. Government organizations are divided into organizational units which called responsibility centre. The responsibility center is important in every activity. This study is performed at the Departemen. This purpose of this study is to examine whether the implementation of vehicle tax collection management control systems at Department of Revenue of North Sulawesi Province are effective and efficient, begins with the determination of the vision and mission as well as goals, objectives, organizational structure design. Then continued with the preparation of work program and accountability reports.

Keywords: management control systems, responsibility centre.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang produksi, contoh barang produksi yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman sekarang ini yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini meliputi mobil dan motor.

Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang membantu dalam pembangunan nasional yaitu pajak kendaraan bermotor, Dalam penerapan sistem pemerintahan daerah itu sendiri sangatlah efektif apabila ada pelaksanaan fungsi *controlling* (pengawasan dan pengendalian) serta pusat pertanggungjawaban dari masing-masing kepala unit kerja terhadap pemungutan pajak, khususnya pajak untuk kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara.

Dalam penerapan sistem pemerintahan daerah itu sendiri sangatlah efektif apabila ada pelaksanaan fungsi *controlling* (pengawasan dan pengendalian) serta pusat pertanggungjawaban dari masing-masing kepala unit kerja terhadap pemungutan pajak, khususnya pajak untuk kendaraan bermotor. Dalam pengendalian struktur manajemen menurut Maulana (2001:21) pusat pertanggungjawaban didefinisikan sebagai suatu proses dalam unit kerja yang berfungsi untuk mengarahkan organisasi agar melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara merupakan salah satu sektor publik yang dalam proses aktifitasnya memang dibutuhkan adanya sistem pengendalian manajemen. Agar supaya lebih mudah mengontrol dan mengamati serta menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi mengingat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai unit-unit dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola hasil pajak kendaraan bermotor yang ada di Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara telah efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Manajemen

Pengertian akuntansi manajemen menurut Simamora (2012:4) merupakan cabang akuntansi yang memasok informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan bagaimana sumberdaya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Setiap kajian atas akuntansi manajemen harus didahului dengan pemahaman perihal proses manajemen. Penerapan akuntansi manajemen juga diterapkan pada sektor publik. Suatu akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Adapun dalam fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemennya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral (Hansen dan Mowen, 2007: 6) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi financial organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Manajemen

Anthony dan Govindarajan (2008: 7) yang diterjemahkan oleh Kurniawan, menjelaskan bahwa sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni: lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan

mengulangi serangkaian tahapan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu.

Struktur Pengendalian Manajemen

Struktur pengendalian manajemen merupakan suatu pengendalian yang dilakukan oleh manajemen pada pelaksanaan struktur yang ada dalam organisasi (Maulana, 2001:44). Pengendalian dilakukan pada pelaksanaan tugas setiap pesonil yang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Dengan memperhatikan penyampaian informasi dari setiap unit yang dalam organisasi. Dalam struktur pengendalian manajemen memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggung jawaban terbagi empat : Pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.

Proses Pengendalian Manajemen

Proses pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan (2008:19) adalah proses dimana para manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan". Banyak proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi informal antara seorang manajer dengan manajer lain atau antara manajer dan bawahannya. Interaksi informal ini menjadi bagian dalam suatu sistem perencanaan dan pengendalian formal. Pengendalian manajemen dalam suatu proses dimulai dengan pengendalian pada proses penyusunan program. Setelah program disusun berdasarkan visi dan misi dalam suatu organisasi kemudian dilakukan penyusunan anggaran.

Perpajakan

Definisi pajak itu sendiri menurut Soemitro (2009:11) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lembaga pemerintah yang mengatur dan mengelola perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jendral Pajak. yang bernaung pada Departement Keuangan Republik Indonesia. Adriani (2009: 23) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor publik

Pengendalian sektor publik merupakan alat manajemen dalam proses pengembalian keputusan dan pelaksanaan keputusan yang diambil tersebut. Mardiasmo (2009:45) mengatakan "manajemen pengendalian sektor publik dapat didefinisikan sebagai proses yang mengarahkan organisasi sektor publik pada pola aktivitas dalam kerangka lingkungan yang berubah. Juga dapat diinterpretasikan sebagai proses untuk memotifasi dan memberi inspirasi pada aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi sektor publik.

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi manajemen dalam organisasi berperan untuk menyediakan laporan-laporan yang mengevaluasi kinerja manajer dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. *Kotler's A Dictionary for Accountants* yang dikutip oleh Usry dan Hammer (2005:453) mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk secara bijaksana melaksanakan wewenang yang dilimpahkan atau diserahkan kepada perseorangan atau kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan atau keputusan organisasional.

Definisi pertanggungjawaban menurut Simamora (2012:231) adalah mengacu pada ukuran seberapa baik pencapaian hasil-hasil, dan hal ini dipenuhi melalui laporan kinerja berkala yang diperlihatkan kepada manajer yang mendelegasikan wewenang mengenai apa yang terjadi. Horngren (2006:307) mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat itu

dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.

Penelitian Terdahulu

Febriati (2011) dengan judul skripsi Evaluasi sistem pengendalian manajem internal kontrol pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah kota singkawang. Tujuan Untuk mengetahui sejauh mana UPPD mencapai efektifitas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, metode penelitian yang dipakai yaitu pengembangan deskripsi kasus. Hasil penelitian sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak di kota Singkawang telah efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:10) Mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Penelitian ini adalah jenis kualitatif.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam skripsi ini data kualitatif berupa laporan sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak, visi dan misi, struktur organisasi, program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, dan tidak melalui media perantara. dalam skripsi ini data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berupa laporan penilaian hasil penerapan sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak kendaraan bermotor, visi dan misi, struktur organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara berupa mewawancarai secara langsung aparat-aparat yang terkait pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan observasi langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan. Data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara di evaluasi dengan cara membandingkan data-data yang telah ada dengan teori-teori kepustakaan yang tersaji. Disamping itu juga analisis digunakan melalui pengujian terhadap perilaku akuntansi pertanggungjawaban dengan melihat unsur-unsur yang mendukung pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Sulawesi Utara. Dinas Pendapatan Daerah ini dibentuk berdasarkan :

- Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 tahun 2001.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- f. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Visi dan Misi

Searah dengan pencapaian visi Provinsi Sulawesi Utara, visi Dinas Pendapatan Daerah adalah *Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima*. Dengan adanya Visi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai suatu komitmen untuk mengoptimalkan Penerimaan PAD melalui suatu misi, yaitu: Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkeadilan, Mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellent service*), terpercaya, transparan dan akuntabel, Mewujudkan sumber daya aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan profesional, Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Hasil Penelitian

1. Tugas

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Provinsi, memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam mengontrol serta mengevaluasi sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada di UPTD-UPTD di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Utara sebagai suatu pusat pertanggungjawaban.

2. Fungsi.

Dalam mengontrol dan mengevaluasi pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berjalan di UPTD sebagai suatu pusat pertanggungjawaban, Dinas Provinsi Sulawesi Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan koordinasi tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diserahkan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan semua UPTD/SAMSAT se Provinsi Sulawesi Utara agar melakukan pelayanan sesuai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor atau standar pelayanan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan Pemberian keringanan bagi kendaraan bermotor yang sudah menunggak dalam rangka menghidupkan kembali potensi-potensi pajak.
- d. Mengakomodir belanja cetak Nota Pajak dan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang secara rutin dilakukan setiap bulan.
- e. melakukan kegiatan Rapat Koordinasi untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT Kabupaten dan Kota.
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian dan PT (PERSERO) PT. Jasa Raharja sebagai pelaksanaan tugas sekretariat Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara.
- g. Penetapan isu penting yang perlu dibenahi/diperbaiki bersama untuk peningkatan pelayanan SAMSAT.
- h. Mengkoordinasikan tersedianya data objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut secara Progresif.
- i. Mengkoordinasikan tersedianya data kendaraan bermotor yang tidak ada dalam daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur yang berlaku.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan mendapatkan data dan informasi dari masing-masing UPTD dan selanjutnya dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan dalam rangka pengembangan UPTD/SAMSAT ke depan.
- k. Melaksanakan monitoring dan sidak dalam rangka pengamanan proses pemungutan, penyeteroran dan penatausahaan pajak kendaraan bermotor.

3. Penyusunan Program

Program disusun berdasarkan penetapan visi dan misi yang ada dalam Dinas. Proses ini merupakan tolak ukur untuk menjelankan kegiatan dalam organisasi. Program yang dibuat Dinas Pendapatan Daerah sangat mendukung tercapainya visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Program yang telah disusun untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara penuh apabila dalam pengujian menunjukkan bahwa usulan tersebut memiliki kesempatan besar untuk berhasil. Penyusunan program memerlukan suatu sistem yang siap untuk melakukan pengujian seperti pengambil keputusan persetujuan gagasan yang ada apakah layak untuk dilaksanakan. Dalam organisasi sektor publik penyusunan sangatlah penting. Karena organisasi itu atau Dinas Pendapatan Daerah merupakan pengelola dana masyarakat, sehingga harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Penyusunan Anggaran

Mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat anggaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit dalam organisasi dan seberapa besar pencapaiannya akan terukur dengan mengavaluasi antara anggaran dan realisasi. Melalui evaluasi ini dapat diketahui penyimpangan-penyipangan yang terjadi pada unit-unit tersebut.

Sistem penganggaran yang diterapkan yaitu dengan membuat rencana anggaran satuan kerja kemudian mengajukannya pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

5. Laporan Pertanggungjawaban

Keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan sebagai tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan dapat dilihat dari laporan. Dalam laporan mencantumkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki untuk mencapai apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Laporan pertanggungjawaban terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dimulai dari laporan yang dibuat oleh 15 UPTD yang ada, kemudian di laporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pembahasan

Evaluasi Kinerja

Sebagai Suatu Pusat pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara memiliki kinerja-kinerja yang telah dicapai dalam hal ini pada pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Wajib Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah membuka 6 (Enam) Unit Pelayanan sebagai berikut:

1. SAMSAT Bantu Polda Sulut, UPTD Manado
2. SAMSAT Corner Mega Mall, UPTD Manado
3. SAMSAT Outlet Tuminting, UPTD Manado
4. SAMSAT Drive Thru, UPTD Manado
5. SAMSAT Keliling, UPTD Manado
6. SAMSAT Pembantu Dumoga, UPTD Bolaang Mongondow.

Dinas Pendapatan Daerah juga memantau langsung ke UPTD-UPTD yang ada, untuk mengontrol jalannya pemungutan pajak kendaraan bermotor, menilai keabsahan bukti-bukti pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menjadi suatu tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin Keamanan di kantor Induk/Pusat maupun UPTD dan Kantor SAMSAT / SAMSAT, dalam arti tidak ada kejadian yang menjurus pada tindakan kriminal dan aman terkendali. Dalam melakukan pengamanan terutama dalam penyetoran uang penerimaan pada Kantor SAMSAT pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk mendapatkan pengawalan ke Bank. Adapun Petugas Keamanan pada kantor Pusat / UPTD dan SAMSAT merupakan tenaga kontrak yang berlaku selama 1 tahun dan akan diperpanjang pada tahun berikutnya apabila diperlukan.

Dinas Pendapatan Daerah Bersama-sama dengan UPTD yang ada di Kabupaten dan Kota melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, Berkoordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian dan PT (PERSERO) PT. Jasa Raharja yang merupakan perseroan yang bergerak dibidang asuransi sebagai pelaksanaan tugas sekretariat Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara, serta melaksanakan sidak bersama dengan kepolisian guna mengontrol pengendalian pembayaran pajak oleh masyarakat. Pada tabel berikut dapat kita lihat hasil penerapan sistem

pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4.5 Penilaian hasil penerapan sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Utara.

Indikator SPM	Teori	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Struktur Pengendalian Manajemen	Menghendaki adanya struktur organisasi yang jelas menetapkan tugas, wewenang, dan tanggungjawab.	Dinas Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan UU No 3 Tahun 2008.	Dinas Pendapatan Daerah Prov Sulut, memenuhi syarat dalam penerapan Struktur Pengendalian Manajemen.
Proses Pengendalian Manajemen	Menghendaki adanya penerapan visi misi, program, penyusunan anggaran, laporan, pertanggungjawaban	Dinas Pendapatan Daerah, memiliki visimisi, program-program, penyusunan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban yang baik dan jelas.	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut, Memenuhi syarat dalam Proses pengendalian manajemen
Pusat pertanggungjawaban	Unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer, dan memiliki suatu tanggungjawab	Dinas Pendapatan Daerah memiliki Kepala Dinas, dan bertanggungjawab pada 15 UPTD dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut. Merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yaitu pusat pendapatan.

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada pada tabel 4.5, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah efektif. Penerapan sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor juga dapat dinilai telah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang melebihi target, yang dicapai dengan rutinitas dan program-program kerja serta anggaran yang sama. Dalam artian anggaran dan program kerja tidak ditambah namun pendapatan meningkat.

Tabel 4.6 hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun 2010-2012.

No	Jenis kendaraan	Tahun 2010 (unit)	Tahun 2011 (unit)	Tahun 2012 (unit)	Hasil pemungutan pajak (rupiah)		
					2010	2011	2012
1	Sedan	2.786	2.869	2.938	5.572.000.000	5.738.000.000	5.876.000.000
2	jeep	3587	3908	4150	3.587.000.000	3.908.000.000	4.150.000.000
3	Bus	170	186	204	340.000.000	372.000.000	408.000.000
4	Mini bus	15.334	19.793	24.071	15.334.000.000	19.793.000.000	24.071.000.000
5	microlet	8.934	7.755	7.808	8.934.000.000	7.755.000.000	7.808.000.000
6	ambulance	52	76	76	52.000.000	76.000.000	76.000.000
7	truck	5.539	5.698	6.438	11.078.000.000	11.396.000.000	12.876.000.000
8	tangki	156	175	208	312.000.000	350.000.000	416.000.000
9	Sepeda motor	163.551	215.107	205.649	40.887.750.000	53.776.750.000	51.276.750.000
Jumlah seluruh		200.109	255.567	251.488	86.096.750.000	103.184.750.000	96.957.750.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Target untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 sebesar 85.000.000.000. Bila dibandingkan dengan realisasi hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada pada tabel 4.6 yaitu sebesar 96.957.750.000. hal ini berarti bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 melampaui target. Kinerja ini dicapai dengan tidak menambah anggaran belanja serta tidak menambah unit kerja dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil penjelasan diatas bisa diartikan bahwa sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang diterapkan sudah efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dengan adanya visi misi, program-program, struktur organisasi, penyusunan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang baik dan jelas,serta hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor yang melampaui target dengan tidak menambah anggaran serta unit kerja yang ada.

Saran

Penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sebaiknya perlu dilakukan peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana ke UPTD-UPTD.
2. Membuat sistem pelaporan secara online.
3. Lebih Meningkatkan sosialisasi guna memberikan informasi tentang pajak melalui selebaran, maupun media elektronik, kepada masyarakat selaku wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Anthoni, Robert, Govindarajan, Vijay. 2008. *Sistem Pengendalian Manajemen*, diterjemahkan oleh kurniawan. Star Gate. Jakarta.
- Febriati. 2011. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Vol 7*. Universitas Singkawang. Kalimantan.
- Hansen., Mowen. 2007. *Akuntansi Manajemen*. Diterjemahkan oleh Ancella A.Hermawan. Erlangga. Jakarta.
- Hongren, Charles T. 2006. *Pengantar Akuntansi Manajemen*. Jilid 2. diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro. 2009. *Metodologi Penelitian*. Alfabeta. Jakarta
- Maulana. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Simamora. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Star Gate. Jakarta.
- Soemitro. 2009. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Usry, Hammer. 2005. *Akuntansi Pertanggung Jawaban*. Kotler's A Dictionary for Accountans. Jakarta.